



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKjIP)

TAHUN 2024

DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Jalan Kesuma Bangsa No. 1 Telp. (0541) 741964 - 741803 - 741807 Fax. (0541) 736003
Email: dishut.kaltim@gmail.com; renram.dishut@gmail.com

SAMARINDA

IKTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja satu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi serta memuat informasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Instansi.

Berdasarkan telaah terhadap Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016-2036, Rencana Kehutanan Tingkat Nasional dan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Tahun 2011-2030, dan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019-2024, maka secara umum terdapat isu strategis utama yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai tugas pokok dan fungsinya, adalah **"Kontribusi Sektor Kehutanan dalam Mendukung Peningkatan Perekonomian Daerah"** dan **"Penanganan dan Pengembangan Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Sektor Kehutanan"**

LKjIP Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang memuat Perencanaan, Pencapaian, dan Realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 sebagaimana tertuang pada RENSTRA Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

IKU yang digunakan harus mampu mengukur pencapaian sasaran strategis yang dimaksud. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan

melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam RENSTRA Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

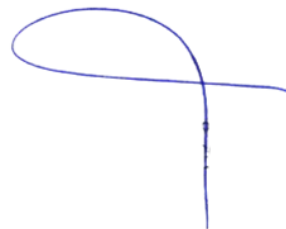
Selanjutnya pada RENSTRA Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki 3 Sasaran Strategis, yaitu:

1. **"Meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan"** dengan indikator Meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan (Triliun Rupiah).
2. **"Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan"** dengan indikator penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dari Business as Usual (BaU) (Juta Ton CO₂e).
3. **"Peningkatan Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Daerah"** dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Indeks) dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai).

Indikator Kinerja Sasaran sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi. Hasil analisa LKjIP Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis cukup berhasil memenuhi target capaian perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dengan Pagu Anggaran Rp630.852.636.087 dan realisasi Rp596.892.601.445 dengan rasio capaian sebesar 94,62%.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 ini dibuat, untuk dapat dimanfaatkan sebagai salah satu media komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

**KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**



H. JOKO ISTANTO, S.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750807200031003

DAFTAR ISI

Ikhtisar Eksekutif	i
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Dasar Pembentukan Organisasi.....	1
B. Tiugas dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi	3
D. Sumber Daya Aparatur	6
E. Aspek Strategis Rganisasi	7
F. Permasalahan Utama	9
G. Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah	21
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	23
A. Perencanaan Strategis.....	23
B. Indikator Kinerja Utama	32
C. Perjanjian Kinerja.....	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	35
A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun sebelumnya pada sub bab ini disajikan	35
B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi.....	38
C. Analisis Capaian kinerja	38
BAB IV PENUTUP	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1. Struktur Organisasi Dinas	5
Gambar I-2. UPTD KPHP/L di Kalimantan Timur	13

DAFTAR TABEL

Tabel I-1.	Sumber Daya Aparatur	6
Tabel I-2.	Sebaran Indikatif Areal Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur	14
Tabel I-3.	Perkembangan Perhutanan Sosial Per Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur.....	15
Tabel I-4.	Data Lahan Kritis Menurut Tingkat Kekritisan Lahan	16
Tabel I-5.	Data Luas Hutan dan Lahan Kritis yang di Rehabilitasi Per-Kabupaten/Kota Tahun 2024.....	16
Tabel I-6.	Data Sebaran Hotspot Tahun 2019 s/d Tahun 2024	18
Tabel I-7.	Data Kerusakkan Hutan Tahun 2024	20
Tabel I-8.	Data Sarana dan Prasarana Tahun 2024.....	21
Tabel II-1.	Tujuan dan Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (Renstra 2024-2026)	24
Tabel II-2.	Tujuan, sasaran, indikator sasaran, target tahunan dan Program/kegiatan serta penyajian IKU.....	26
Tabel II-3.	Program/Kegiatan untuk mencapai tujuan/sasaran.....	27
Tabel II-4.	Indikator Kinerja Utama.....	32
Tabel II-5.	Perjanjian Kineja Tahun 2024 (Sasaran Srategis)	33
Tabel II-6.	Perjanjian Kineja Tahun 2024 (Program)	34
Tabel III-1.	Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja	35

Tabel III-2. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas implemtasi Sistem AKIP	35
Tabel III-3. Pengukuran Capaian Kerja	38
Tabel III-4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja Tahun 2024	38
Tabel III-5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya	39
Tabel III-6. Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2024 dengan target RENSTRA Dinas Kehutanan Prov. Kaltim Tahun 2024-2026	39
Tabel III-7. Effesiensi penggunaan sumber daya.....	41
Tabel III-8. Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	44
Tabel III-9. Realisasi Anggaran Sesuai dengan perjanjian Kinerja.....	62
Tabel III-10. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembar Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1). Dinas Kehutanan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kehutanan.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 Pasal 593 Dinas Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kehutanan. Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud dalam Pasal 595 Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang kehutanan;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kehutanan;
- d. Pengarahan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk

- ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan;
 - f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
 - g. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pengelolaan Daerah aliran sungai (DAS) dan rehabilitasi hutan dan lahan;
 - h. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat hutan;
 - i. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 - j. Pelaksanaan Cabang Dinas;
 - k. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - l. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - m. Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 596 Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:

- a. Merumuskan program kerja berdasarkan rencana strategis sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c. Membina bawahan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yg diharapkan;
- d. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;

- e. Menandatangani naskah Dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi;
- f. Mengoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang kehutanan dan menetapkan standar pelayanan minimal unit pelaksana teknis daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- g. Merumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perencanaan dan tata guna hutan, produksi dan pemanfaatan hutan, peredaran dan industri hasil hutan dan perlindungan hasil hutan berdasarkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan penetapan kebijakan lebih lanjut;
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi bidang kehutanan di kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku untuk mengetahui tingkat pencapaian program;
- i. Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Gubernur baik lisan maupun tertulis.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi adalah susunan dan hubungan antara bagian atau unit dalam suatu organisasi yang menunjukkan bagaimana tugas, wewenang, dan tanggung jawab didistribusikan serta dikoordinasikan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari suatu pekerjaan berdasarkan fungsi antara satu dengan yang lain dan

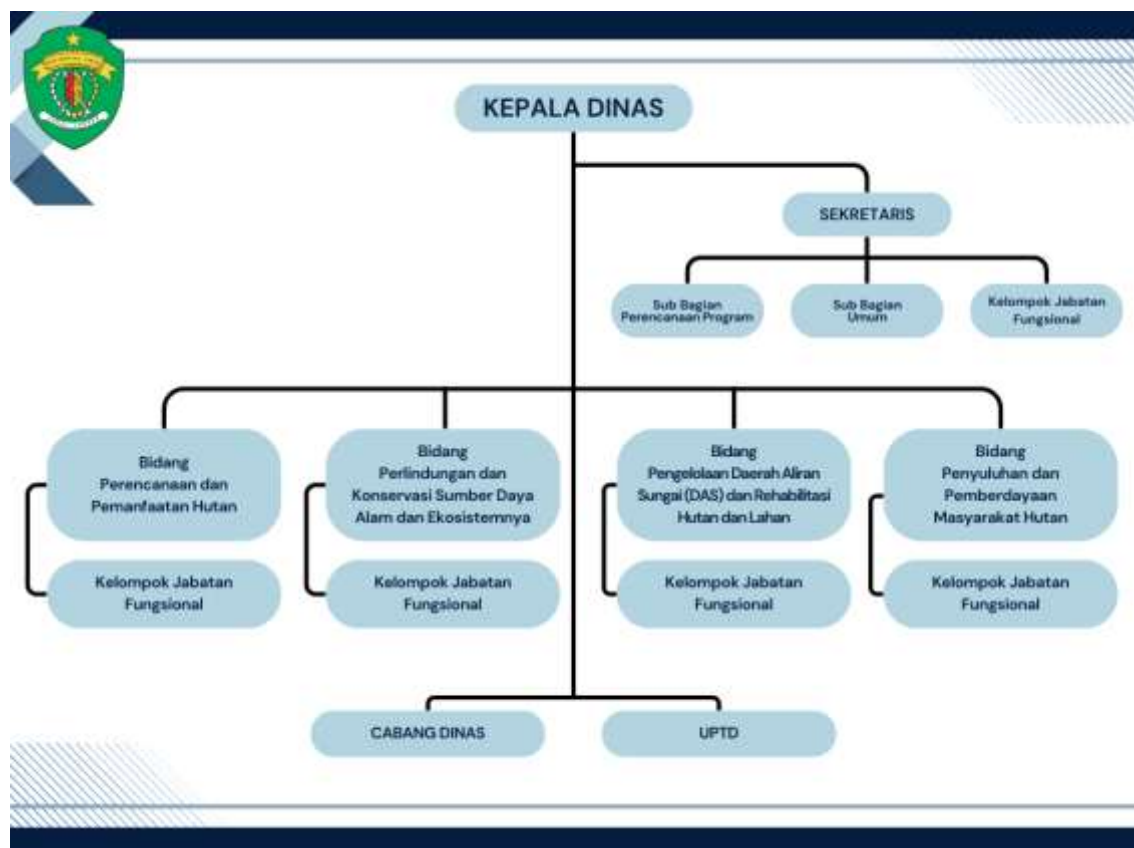
saling berhubungan, memiliki hirarki yang jelas dan melahirkan tingkatan personil dalam suatu organisasi.

Susunan organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh Kepala Dinas dan dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) bidang, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 43 Tahun 2023, serta pembentukan 20 (dua puluh) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019, Untuk lebih detailnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Dinas, membawahkan:
 - 1) Subbagian Perencanaan Program;
 - 2) Subbagian Umum; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
- c. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Lahan
- d. Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan
- e. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD):
 - 1) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang terdiri dari 17 (TujuhBelas):
 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat;
 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara;
 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah;
 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai;
 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar;
 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon;
 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau;
 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi DAS Belayan;
 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan;
 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam;
 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau;

- UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai;
 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn;
 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus;
 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongon;
 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake;
 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo.
- 2) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Terdiri dari atas 2 (dua) UPTD, yaitu:
- UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
 - UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
- 3) UPTD Taman Hutan raya Bukit Soeharto

Berdasarkan garis hirarki dan tingkatan personil dapat digambarkan pada bagan struktur organisasi di bawah ini:



GAMBAR I-1. STRUKTUR ORGANISASI DINAS

D. SUMBER DAYA APARATUR

Dinas Kehutanan dan Lingkup UPTD yang ada di Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan akhir Desember tahun 2024 memiliki jumlah pegawai sebanyak 530 orang dengan rincian sebagaimana dalam tabel 1.

Sumber Daya Manusia (SDM) aparat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Lingkup UPTD dilihat dari tingkat pendidikan maka kualitas SDM tersebut dapat memenuhi dengan kebutuhan dan kualitasnya, hal ini terlihat bahwa 15,28% berpendidikan Pasca Sarjana; 43,77% berpendidikan Sarjana; 10,00 % berpendidikan Diploma; 29,25 % berpendidikan SLTA dan 1,13 % berpendidikan SLTP, dan 0,57 % berpendidikan SD.

Tabel I-1. Sumber Daya Aparatur

NO.	Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
		L	P	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
1.	Kepala Dinas	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
2.	Sekretariat	15	10	2	10	13	-	2	9	-	-	-	-
3.	Bidang Perencanaan dan PH	21	2	4	18	1	-	5	14	-	-	-	-
4.	Bidang Perlindungan dan KSDAE	21	4	2	21	2	-	3	14	2	-	-	-
5.	Bidang PDAS dan RHL	12	5	4	11	2	-	5	6	1	49	1	-
6.	Bidang PPMH	16	5	4	15	2	-	5	13	-	-	-	-
7	UPTD Tahura Bukit Soeharto	29	12	3	32	5	1	4	14	9	-	-	-
8	UPTD KPHL Balikpapan	16	1	1	14	-	2	2	6	3	4	-	-
9	UPTD KPHL Batu Rook	13	2	4	10	1	-	5	5	-	-	-	-
10	UPTD KPHP Batu Ayau	13	3	1	11	4	-	3	5	4	-	-	-
11.	UPTD KPHP Bengalon	15	7	2	16	4	-	4	10	3	4	1	-
12.	UPTD KPHP Berau Barat	13	1	3	6	5	-	3	4	1	-	-	-
13.	UPTD KPHP Berau Pantai	10	2	2	7	3	-	2	4	2	-	-	-
14.	UPTD KPHP Berau Tengah	12	-	2	8	2	-	2	3	4	14	-	-
15.	UPTD KPHP Berau Utara	14	-	1	11	2	-	1	8	1	4	-	-
16.	UPTD KPHP Bongan	15	6	1	17	3	-	2	7	3	6	-	-
17.	UPTD KPHP Damai	19	4	3	14	6	-	5	8	3	5	-	-

NO.	Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
		L	P	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
18.	UPTD KPHP Delta Mahakam	20	5	3	15	7	-	4	15	-	3	-	-
19.	UPTD KPHP Kelinjau	16	6	2	19	1	-	3	13	1	13	-	1
20.	UPTD KPHP Kendilo	18	3	1	16	3	1	2	9	1	4	1	1
21.	UPTD KPHP Manubar	17	5	2	18	2	-	3	11	2	5	-	-
22.	UPTD KPHP Meratus	22	9	2	24	5	-	2	13	2	4	-	-
23.	UPTD KPHP Mook Manor Bulatn	18	4	2	19	1	-	3	13	2	4	1	-
24.	UPTD KPHP Santan	24	7	4	22	5	-	6	9	4	5	-	1
25.	UPTD KPHP Sub Das Belayan	21	5	1	19	6	-	2	14	2	3	1	-
26.	UPTD KPHP Telake	9	2	2	7	2	-	2	5	3	3	-	-
J U M L A H		420	110	59	380	87	4	81	232	53	155	6	3
JUMLAH PNS		530											

E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dalam mewujudkan tata kelola yang efektif, efisien dan akuntabel guna mendukung pembangunan untuk menjalankan fungsi, suatu organisasi merancang dan membuat strategi yang selaras dengan tujuan dari organisasi tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur membuat prioritas kegiatan dan memperhatikan beberapa aspek strategis dalam menjalankan suatu organisasi, diantaranya:

1. Visi, Misi dan tujuan

Menentukan rencana program utama yang akan dicapai sehingga tujuan dari pembanguann daerah dapat tercapai. Hal ini tidak lepas dari visi dan misi, tujuan dan sasaran dari pembangunan daerah.

2. Tata Kelola yang baik (*Good Governance*)

Sistem tata kelola yang baik ini sangat penting karena mempunyai prinsip utama seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas dan efisiensi guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

3. Konservasi dan Rehabilitasi Hutan

Konservasi dan rehabilitasi merupakan hal yang saling berkaitan dalam menjaga kelestarian lingkungan karena konservasi berfokus pada perlindungan dan pelestarian, sedangkan rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan ekosistem yang telah rusak keduanya sangat penting dalam upaya pemulihan lingkungan.

4. Pengelolaan Sumber Daya Hutan secara Berkelanjutan

Pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan adalah untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan hutan bagi kebutuhan manusia dan pelestarian ekosistem alam. Agar hutan tetap lestari maka perlu adanya solusi dalam pengelolaan hutan dengan memberdayakan masyarakat sekitar hutan seperti perhutanan sosial, hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan inovasi dalam pengelolaan hutan, sehingga sumber daya hutan dapat dimanfaatkan secara bijaksana.

5. Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan Kehutanan

Pemberdayaan masyarakat dan kemitraan kehutanan merupakan strategi sangat penting dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan, karena masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan memiliki peran dalam menjaga, melindungi, dan memanfaatkan sumber daya hutan dengan bijak, melalui kegiatan perhutanan sosial masyarakat diberikan akses legal untuk mengelola hutan dengan bijak, hal ini dimaksudkan dengan keterlibatan masyarakat diharapkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan dapat meningkat karena dapat memberikan peluang ekonomi berbasis hasil hutan bukan kayu, ekowisata dan agroforestri. Dengan keterlibatan masyarakat diharapkan dalam pengelolaan hutan tetap lestari dan memberikan manfaat bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.

6. Pengendalian kebakaran hutan dan perubahan iklim

Pengendalian kebakaran hutan dan perubahan iklim merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam menjaga kelestarian lingkungan, kebakaran hutan yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, serta berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca yang

mempercepat perubahan iklim. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan strategi untuk pengendalian kebakaran hutan seperti pencegahan, deteksi dini dan respons cepat. Untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di tingkat tapak maka perlu keterlibatan masyarakat dalam hal pencegahan pengendalian kebakaran hutan dengan membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA).

7. Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi Kehutanan

Mengembangkan sistem informasi geospasial dalam pemantauan hutan dan menerapkan e-Government dalam administrasi dan perizinan kehutanan akan lebih efisien, akurat, transparan dan berkelanjutan karena mendukung upaya mitigasi iklim, serta menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi sumberdaya hutan.

8. Penegakan Hukum dan Pengawasan Hutan

Penegakan hukum dan pengawasan hutan merupakan kunci dalam kelestarian hutan. Strategi dalam pengawasan hutan yaitu dengan melibatkan unsur pemerintah yang terkait, aparat penegak hukum dan masyarakat, dengan cara melakukan kegiatan patroli gabungan dengan unsur pemerintahan terkait dengan penegakan hukum, selain itu di tingkat tapak untuk areal di sekitar kawasan hutan dibentuk Masyarakat Mitra Polhut (MMP) hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan, sehingga hutan tetap lestari.

9. Pelayanan prima

Salah satu indikator keberhasilan suatu instansi ditentukan seberapa besar instansi tersebut mampu mewujudkan pelayanan primanya kepada masyarakat.

F. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)

Pemanfaatan hutan masih bertumpu pada produksi hasil hutan kayu, yang saat ini mulai mengalami stagnan, seiring dengan semakin tumbuhnya produksi pengganti kayu. Perubahan peraturan dan kebijakan kehutanan nasional, diharapkan dapat mendorong diversifikasi produk hasil hutan, terutama

pengembangan pemanfaatan hutan untuk hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Prioritas utama yang perlu dilakukan adalah mempertahankan dan tetap meningkatkan produktivitas dan produksi hasil hutan kayu, sembari memastikan ketercukupan bahan baku untuk industri usaha pengolahan hasil hutan, serta mendorong produksi hasil hutan kayu dan jasa lingkungan.

perubahan iklim dan perkembangan upaya mitigasi perubahan iklim dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan, dapat menjadi peluang baru dalam meningkatkan upaya penurunan emisi GRK dari sektor kehutanan. Terbitnya kebijakan Indonesia's Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink tahun 2030 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai upaya pencapaian target Kontribusi Nasional yang Ditentukan tahun (*Nationally Determined Contribution/NDC*) tahun 2030 dan percepatan *Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience* (LTS-LCCR) 2050, merupakan ruang bagi sektor Kehutanan Kalimantan Timur untuk berkontribusi dalam upaya tersebut

Berdasarkan telaahan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 didukung dengan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036, Telaahan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional dan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Tahun 2011-2030, Telaahan Rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019-2024, maka secara umum terdapat isu strategis dalam pembangunan Sektor Kehutanan di Kalimantan Timur tahun 2024-2026, adalah :

"Kontribusi Sektor Kehutanan dalam Mendukung Peningkatan Perekonomian Daerah dan Penangan dan Pengembangan upaya penurunan Gas Rumah Kaca Dari Sektor Kehutanan"

Isu-isu strategis bagi Dinas Kehutanan diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan Kehutanan Kalimantan Timur maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Kehutanan di masa mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi antara lain adalah :

1. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan hutan berkelanjutan

Potensi hutan yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur sangat banyak. Yang paling menonjol saat ini adalah pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan alam dan tanaman. Salah satu kontribusinya adalah sebagai penghasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kami merasa apa yang sudah dilakukan masih bisa ditingkatkan. Banyak peluang-peluang yang bisa dilakukan dimasa depan untuk memaksimalkan potensi hutan.

Dengan tetap mempertahankan kinerja pencapaian penerimaan PNBP tahun-tahun sebelumnya, kami melihat beberapa berpeluang yang bisa meningkatkan potensi hasil hutan.

Pertama, optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari kayu. Oleh beberapa kalangan PNBP dari pemanenan kayu dianggap belum mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Masih banyak kayu-kayu utamanya dari hutan alam yang belum dibayarkan PSDH dan DR nya. Terutama kayu-kayu hasil land clearing di areal pinjam pakai kawasan hutan dan di areal konversi. Kayu hasil pennebangan tersebut dengan alasan tertentu sengaja tidak di LHP-kan. Meskipun besaran angka kerugian masih bisa diperdebatkan, tapi yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana menyusun program dan kegiatan yang mampu menyelamatkan asset-aset negara tersebut.

Kedua, pemanfaatan limbah kayu hasil pemanenan di hutan dan pengolahan di industri. Sebuah fakta, bahwa kegiatan pennebangan pohon dan pengolahannya menghasilkan limbah yang cukup besar. Hal ini diperkuat dengan beberapa hasil penelitian, dengan variasi prosentase limbah yang dihasilkan. Kondisi ini idealnya mampu menjadi pendorong untuk memperkuat program yang berorientasi menuju pengolahan limbah kayu menjadi produk-produk yang bisa memberikan nilai tambah. Termasuk juga dalam penatausahaan kayu limbah pemanenan tersebut. Hal ini menjadi selaras dengan kebijakan

pemanfaatan limbah kayu sebagaimana tertuang di dalam rancangan peraturan daerah masterplan perubahan iklim di Kalimantan Timur.

Ketiga, mengembangkan potensi hutan lainnya selain kayu.

Selama ini kepopuleran kayu belum mampu diikuti oleh hasil hutan lainnya, seperti hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Kami menyadari bahwa tidak mudah untuk mensejajarkan potensi hutan selain kayu dengan kayu saat ini. Apalagi jika yang menjadi standar acuannya adalah besarnya kontribusi dalam PNBK.

Kami menyadari bahwa dengan semakin tidak memberikan perhatian kepada hal ini, akan membuat potensinya semakin jauh tertinggal dari kayu. Disatu sisi, pembahasan, diskusi, dan penelitian di tingkat regional, provinsi, dan bahkan internasional perihal pemanfaatan hutan bukan kayu sudah jauh berkembang jauh. Apalagi jika dikaitkan dengan peran hutan dalam pengurangan emisi gas rumah kaca. Hal tersebut membuat kami perlu memberikan perhatian yang lebih dalam bentuk program dan kegiatan terkait. Namun, tetap harus rasional dalam menetapkan target-target di dalam RENSTRA.

Keempat, memaksimalkan peran unit pengelola hutan tingkat tapak. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki 20 (dua puluh) organisasi pemerintah tingkat tapak (lapangan) berbentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).



Gambar I-2. UPTD KPHP/L di Kalimantan Timur

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (2023)

KPH diharapkan bisa menjalankan peran manajerial atas wilayah hutannya. Tidak seperti yang selama ini telah terjadi. Pemerintah (termasuk pemerintah daerah) cenderung menjalankan fungsi administrasi perijinan pemanfaatan hutan saja. Ini pada gilirannya melemahkan sistem pengamanan aset sumberdaya hutan oleh pemerintah. Dikarenakan sepenuhnya kepada pelaku usaha, sedangkan untuk areal-areal yang tidak berijin menjadi open access.

Namun demikian, kami masih harus bersabar untuk melihat KPH tersebut menjadi organisasi yang mandiri. Organisasi yang kegiatan operasionalnya tidak sepenuhnya bergantung kepada APBN atau APBD. Sebaliknya mampu mengelola, mengusahakan dan menghasilkan pendapatan dari wilayah-wilayah tertentu yang memiliki potensi berupa kayu, non-kayu dan jasa lingkungan. Banyak pekerjaan-pekerjaan rumah mendesak yang segera ditindak lanjuti. Seperti penataan kembali SDM-

SDM yang ada, paska beralihnya status kepegawaian SDM Kehutanan dari pegawai kabupaten/kota menjadi pegawai provinsi. Lebih dari sebagian tersebut saat ini ditempatkan di KPH. Hal lainnya adalah adalah percepatan penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) untuk beberapa KPH. Segera menyusul pembuatan dokumen-dokumen lainnya seperti Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJP). Hal-hal di atas harus dilaksanakan ditengah kondisi dukungan penganggaran (APBD) bagi KPH yang terbatas. Selain itu cara pandang tidak sedikit Sumber Daya Manusia (SDM) kami (yang ada di provinsi dan KPH) yang belum sepenuhnya memahami konsep pengelolaan KPH).

2. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian fungsi dan manfaat sumberdaya hutan

Program perhutanan sosial dan kemitraan sesungguhnya bukan merupakan program baru. Dari 20.000 hektar target pemerintah tahun 2024, berdasarkan rekapitulasi perkembangan Piaps Revisi IX seluas 881.198,03 hektar di Provinsi Kalimantan Timur, seperti tabel 2 di bawah ini

Tabel I-2. Sebaran Indikatif Areal Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur

No	Kabupaten/Kota	Status dan Fungsi Kawasan Hutan				Jumlah Total
		HL	HP	HPK	HPT	
1	Berau	32.499,50	26.527,29	11.075,89	2.696,79	72.799,48
2	Kota Balikpapan	2,40	124,16	-	-	126,56
3	Kota Bontang	3,56	-	55,76	-	59,32
4	Kota Samarinda	-	48,54	-	-	48,54
5	Kutai Barat	40.629,49	6.140,85	71,34	3.156,99	49.998,67
6	Kutai Kartanegara	12.747,54	46.472,89	1.772,25	15.701,26	76.693,94
7	Kutai Timur	83.251,87	16.198,87	360,47	57.995,50	157.806,71
8	Mahakam Ulu	421.682,98	7.301,90		49.991,74	478.976,63
9	Paser	11.549,02	8.743,92	3.017,76	20.734,55	44.045,25

No	Kabupaten/Kota	Status dan Fungsi Kawasan Hutan				Jumlah Total
		HL	HP	HPK	HPT	
10	Penajam Paser Utara	-	642,93	-	-	642,93
Jumlah Total		602.366,37	112.201,35	16.353,47	150.276,84	881.198,03

Sumber : Target perhutanan sosial (Pencadangan, Potensi dan Indikatif) di Kalimantan Timur s.d 2024 seluas 881.198,03 Ha. Angka ini diperoleh dari Peta Indikatif Arahkan Perhutanan Sosial (PIAPS Revisi IX).

Rekapitulasi perkembangan perhutanan sosial Provinsi Kalimantan Timur s/d Tahun 2024 sebesar 330.184,61 hektar dengan 179 Unit, yang terdiri dari: Hutan Desa seluas 285.690,94 hektar sebanyak 84 Unit; Hutan Kemasyarakatan (HKm) seluas 19.877,45 hektar sebanyak 70 Unit; Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas 16.215,48 hektar sebanyak 18 Unit; Kemitraan Kehutanan seluas 629,89 hektar sebanyak 5 Unit; Dan Hutan Adat seluas 7.770,85 Ha sebanyak 2 Unit. Adapun rincian per kabupaten dan per jenis skema perhutanan sosial dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel I-3. Perkembangan Perhutanan Sosial Per Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur

NO.	KABUPATEN	JUMLAH					LUAS (HA)					TOTAL PER-KABUPATEN	
		HD	HKm	HTR	KEMIT RAAN	HA	HD	HKm	HTR	KEMIT RAAN	HA	Jumlah	LUAS (HA)
1	BALIKPAPAN	-	12	-	-	-	-	2.059,48	-	-	-	12	2.059,48
2	BERAU	20	7	1	3	-	103.333,00	1.373,21	1.096,00	424,89	-	31	106.527,10
3	KUTIM	7	10	10	1	-	26.910,75	4.629,00	10.556,48	109,00	-	28	42.205,23
4	KUKAR	25	32	4	-	-	68.906,00	8.709,30	3.574,00	-	-	61	81.189,30
5	KUBAR	11	1	3	-	1	28.216,00	500,00	989,00	-	48,85	16	29.753,85
6	MAHAKAM ULU	15	-	-	1	-	47.792,19	-	-	96,00	-	16	47.888,19
7	PASER	6	5	-	-	1	10.233,00	951,46	-	-	7.722	12	18.906,46
8	PENAJAM PASER UTARA	-	1	-	-	-	-	1.605,00	-	-	-	1	1.605,00
9	BONTANG	-	2	-	-	-	-	50,00	-	-	-	2	50,00
JUMLAH TOTAL KALTIM		84	70	18	5	2	285.690,94	19.877,45	16.215,48	629,89	7.770,85	179	330184,61

Sumber : Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan, Rekapitulasi Perkembangan perhutanan sosial Provinsi Kalimantan Kalimantan Timur s.d 2024

3. Belum optimalnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan rehabilitasi hutan dan lahan

Lahan kritis masih banyak ditemui di Provinsi ini. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di bawah ini, diprediksi luas hutan kritis Kaltim seluas 274.477 hektar. Seluas 272.450,31 hektar dikelompokkan sebagai kritis, dan seluas 1.196,30 hektar sangat kritis.

Tabel I-4. Data Lahan Kritis Menurut Tingkat Kekritisan Lahan

Provinsi	Agak Kritis	Kritis	Potensial Kritis	Sangat Kritis	Tidak kritis	Grand Total
Kalimantan Timur	7.271.198,41	272.450,31	3.512.659,59	1.196,30	3.618.279,64	12.675.784,59
Total						12.675.784,59

Sumber: SK MenLHK No. SK.49/PDASRH/PPPDAS/DAS.0/12/2022

Dengan kemampuan melakukan RHL per tahunnya berkisar antara 6.000 hektar – 10.000 hektar, kami berpandangan bahwa kegiatan reboisasi dan rehabilitasi lahan masih menjadi kegiatan prioritas. Meskipun kami menyadari bahwa upaya penurunan lahan kritis sepenuhnya tidak dapat disandarkan hanya kepada program/kegiatan RHL. Namun perlu juga diimbangi dengan kebijakan-kebijakan yang mengurangi tingginya tingkat konversi hutan dan lahan.

Tabel I-5. Data Luas Hutan dan Lahan Kritis yang di Rehabilitasi Per-Kabupaten/Kota Tahun 2024

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Luas Lahan Kritis yang di Rehabilitasi
1.	KALIMANTAN TIMUR	Berau	189
2.		Kutai Timur	17.555
3.		Kukar	15.804
4.		Kubar	1.926
5.		Mahakam Ulu	463
6.		Bontang	-
7.		Balikpapan	-
8.		PPU dan Paser	2.215
9.		Samarinda	13
JUMLAH			38.165

Upaya-upaya untuk memperbaiki kualitas hutan dan lahan melalui kegiatan RHL seringkali masih menemui beberapa kendala-kendala. Seperti saat ini, belum tersedianya dana pendamping dari APBD untuk mendukung kegiatan RHL yang bersumber dari dana bagi hasil (DBH) DR. Hal ini berpotensi menurunkan realisasi kegiatan RHL di Kaltim. Hal lainnya adalah terbatasnya kewenangan provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan RHL hanya di luar kawasan hutan dan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto. Ini membuat ruang Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menjadi sangat terbatas, sementara kami memiliki sejumlah KPHP/KPHL yang wilayah kerjanya adalah kawasan hutan.

Hal lainnya adalah berkenaan dengan kontribusi sektor kehutanan dalam program penurunan emisi gas rumah kaca. Memang jika merujuk kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dan pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca (GRK) serta penyusunan profil emisi GRK sepenuhnya merupakan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup. Namun dalam pelaksanaannya membutuhkan dukungan dari instansi teknis terkait, termasuk Dinas Kehutanan. Kontribusinya sangat diharapkan dalam upaya-upaya adaptasi dan mitigasi sektor berbasis lahan di Provinsi Kalimantan Timur.

Kegiatan RHL bisa dikatakan sebagai kegiatan utama sektor berbasis lahan untuk mendukung program penurunan emisi gas rumah kaca. Tidak saja berkontribusi dalam perbaikan kualitas tutupan lahan, namun juga membantu untuk mengurangi jumlah karbon yang lepas di atmosfer, dan menyimpannya di dalam vegetasi. Dikarenakan peran gandanya tersebut, maka untuk mendukung program penurunan emisi GRK tersebut kami perlu melakukan pengukuran, verifikasi dan pelaporan kegiatan RHL tersebut.

4. Belum optimalnya perlindungan hutan dan ekosistemnya

Untuk menurunkan intensitas terjadinya gangguan hutan dalam bentuk aktivitas kebakaran hutan, illegal logging/perambahan, dan gangguan terhadap tumbuhan dan satwa yang dilindungi yang terjadi di wilayah yang menjadi kewenangan kami, seperti di Taman Hutan Raya (TAHURA) Bukit Soeharto dan juga di wilayah-wilayah yang menjadi kewenangan KPH.

a) *Kebakaran Hutan*

Kebakaran hutan merupakan salah satu bencana lingkungan yang berdampak luas terhadap kerusakan ekosistem dan kesehatan manusia dan perubahan iklim. Dimana pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 untuk Provinsi Kalimantan Timur terdapat titik hotspot/titik api yang terdeteksi melalui sateli, untuk Satelit yang digunakan dalam medeteksi adanya titik hotspot yaitu melalui satelit NOAA, SNPP dan Terra / Aqua. Dari data dan informasi yang diberikan melalui satelit tersebut maka dijadikan acuan dalam menjalankan kegiatan pencegahan dan pengendalian Kebakaran Hutan dan Laha yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Adapun sebaran hitspot yang ada di Provinsi Kalimantan timur dapat dilihat pada tebel berikut.

Tabel I-6. Data Sebaran Hotspot Tahun 2019 s/d Tahun 2024

Tahun	Titik Hotspot di Provinsi Kalimantan Timur		
	Satuan	Titik Hotspot	Keterangan
2019	Lokasi	991	Satelit NOAA, SNPP, Terra / Aqua
2020	Lokasi	312	
2021	Lokasi	136	
2022	Lokasi	120	
2023	Lokasi	649	
2024	Lokasi	323	

Sumber : Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem

Dari data sebaran hotspot diatas digambarkan perubahan sebaran hotspot pertahun dipengaruhi oleh faktor cuaca, sehingga bisa menurun dan meningkat, Informasi berbasis deteksi dini (seperti informasi penyebaran hotspot harian) dan monitoring kebakaran hutan (hasil verifikasi hotspot, luasan kebakaran) harus selalu tersedia. Meskipun saat ini pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak lagi dilakukan oleh UPTD PKHL, namun sebaliknya dikoordinir oleh Bidang terkait di Dinas Kehutanan Provinsi dengan melibatkan KPH provinsi.

Kegiatan yang sifatnya pencegahan dan pemadaman menjadi tanggung jawab KPH, namun untuk lokasi-lokasi di APL (luar kawasan hutan) membutuhkan koordinasi dan kerjasama dengan para pihak terkait, seperti dengan pertanian, perkebunan, dan lainnya.

b) Ilegal logging/perambahan

Pembalakan liar dan perambahan kawasan hutan sampai dengan saat ini masih terjadi di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini tidak terlepas dari kurangnya tenaga Polisi Kehutanan yang salah satu tugasnya adalah melakukan patroli pengamanan hutan dan kawasan hutan guna mencegah dan membatasi kegiatan perusakan hutan.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki 20 (dua puluh) UPTD KPHP/KPHL/Tahura hanya memiliki 54 (lima puluh empat) ASN yang berkualifikasi sebagai Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan, maka masih terdapat beberapa UPTD KPHP yang belum memiliki tenaga Fungsional Polisi Kehutanan.

Jumlah Polisi Kehutanan tersebut tentu saja belum sebanding dengan luas kawasan hutan Provinsi Kalimantan Timur 8.371.478,05 ha. (sesuai SK no: SK.6628/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan hutan Prov. Kalimantan Timur Sampai Dengan Tahun 2020 tanggal 27 Oktober 2021).

Data kerusakan hutan tahun 2024 karena Illegal Logging dan Perambahan hutan di wilayah lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sebesar 5.896,35 Ha.

Namun demikian upaya Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan dan Kawasan Hutan tetap dilaksanakan salah satunya melalui kegiatan Patroli Mandiri (tanpa anggaran) yang dilaksanakan oleh Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan secara bersamaan oleh Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur dan Seluruh UPTD KPHP/L, patroli pengamanan hutan mulai intensif dilaksanakan pada September s/d Desember 2024.

Hal lain yang dilaksanakan adalah mendorong profesionalisme SDM sehingga mampu menangani perkara-perkara *Illegal Logging*, memberikan keterangan ahli dan penanganan pelanggaran administrasi kehutanan.

Data kerusakan hutan/kawasan hutan selama tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I-7. Data Kerusakan Hutan Tahun 2024

NO	UPTD KPHP/L & TAHURA	ILLEGAL LOGING (Ha)	PERAMBAHAN (Ha)	TOTAL
1	Berau	22,15	2.928,00	2.950,15
2	Kutai Timur	645,11	1.064,88	1.709,99
3	Bontang	-	2,00	2,00
4	Samarinda	-	-	-
5	Kutai Kartanegara	33,70	260,17	293,87
6	Balikpapan	-	22,01	22,01
7	PPU	293,00	246,73	539,73
8	Paser	-	17,00	17,00
9	Kutai Barat	55,68	289,67	345,35
10	Mahulu	-	16,25	16,25
JUMLAH TOTAL		1.049,64	4.846,71	5.896,35

Salah satu upaya guna menekan laju kerusakan hutan dan kawasan hutan adalah dengan menambah jumlah tenaga polisi kehutanan sebagaimana yang di butuhkan sesuai analisis jabatan sebanyak 360 (tiga ratus enampuluh) personil dari berbagai tingkatan kepangkatan untuk

seluruh wilayah hutan dan kawasan hutan di Kalimantan Timur. Sementara jumlah personil saat ini adalah 54 (lima puluh empat) personil sehingga masih kekurangan tenaga polisi kehutanan sekitar 306 (tiga ratus enam) personil.

Hal tersebut tentunya perlu adanya anggaran yang cukup guna pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pembentukan polisi kehutanan. Selain itu sarana dan prasarana perlindungan hutan juga perlu ditingkatkan seperti kendaraan patroli, radio komunikasi, *drone* dan lain-lain yang mendukung kegiatan pengamanan hutan. Dengan demikian diharapkan target penurunan kerusakan hutan dan kawasan hutan dapat tercapai.

G. SARANA DAN PRASARANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Sebagai penunjang semua program/kegiatan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024, dibutuhkan sarana dan prasarana agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai data asset tetap pada tahun 2024 dengan garis besar rincian:

Tabel I-8. Data Sarana dan Prasarana Tahun 2024

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	Tanah	75	M ²
2	Alat Besar	1718	Unit
3	Alat Angkutan	1019	Unit
4	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	3493	Unit
5	Alat Pertanian	220	Unit
6	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	11349	Unit
7	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	1912	Unit
8	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	50	Unit
9	Alat Laboratorium	735	Unit
10	Alat Persenjataan	100	Unit
11	Komputer	2999	Unit
12	Alat Eksplorasi	11	Unit
13	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	11	Unit

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
14	Alat Keselamatan Kerja	319	Unit
15	Peralatan Proses/Produksi	6	Unit
16	Rambu – Rambu	7	Unit
17	Peralatan Olah Raga	10	Unit
18	Bangunan Gedung	465	Unit/M ²
19	Tugu Titik Kontrol/Pasti	42	Unit
20	Jalan Dan Jembatan	27	Unit
21	Bangunan Air	35	Unit
22	Instalasi	16	Unit
23	Jaringan	14	Unit
24	Bahan Perpustakaan	200	Unit
25	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1	Unit
26	Aset Tidak Berwujud	15	Unit
27	Aset Lain-Lain	229	Unit

Sumber: Data SIP BMD 2024

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan¹. Tujuan disampaikan untuk jangka waktu tertentu agar pembangunan kehutanan yang dilaksanakan dapat lebih terarah dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan potensi yang ada. Tujuan yang menjadi tugas dan tanggung jawab oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah :

1. “Mewujudkan diversifikasi ekonomi Sub Sektor Kehutanan” dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi sub Sektor Kehutanan (%).
2. “Menurunkan emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan” dengan indikator Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan dari Business as Usual (BaU) sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan (%).
3. “Mewujudkan Birokrasi pemerintahan yang Akuntabel dan memiliki Pelayanan Publik Berkualitas” dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Indeks) dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Nilai).

2. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah². Sasaran yang

Permendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

akan dicapai yang menjadi tugas dan tanggung jawab oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah :

1. "Meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan" dengan indikator Meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan (Triliun Rupiah).
2. "Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan" dengan indikator penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dari Business as Usual (BaU) (Juta Ton CO₂e).
3. "Peningkatan Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Daerah" dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Indeks) dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai).

Tabel II-1. Tujuan dan Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (Renstra 2024-2026)

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1	2	3	4
Mewujudkan Diversifikasi Ekonomi Sub Sektor Kehutanan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%) Sub Sektor Kehutanan	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Kehutanan	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan (Triliun Rupiah)
Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan Dan Penggunaan Lahan	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan dari <i>Business As Usual (BAU)</i> (%)	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan	Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dari <i>Business As Usual (BAU)</i> (Juta CO ₂ e)
Mewujudkan Birokrasi pemerintahan yang Akuntabel dan memiliki Pelayanan Publik Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah (Indeks)	Peningkatan Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Indeks)
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Nilai)		Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)

3. Anggaran

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki PAGU anggaran sebesar Rp 630.852.636.087 Pada Tahun 2024.

4. Program

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi³.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menyusun rencana program dengan langkah-langkah strategis untuk pembangunan kehutanan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Rencana program ini tidak terlepas dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, serta program Kementerian Kehutanan yang dilaksanakan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, baik itu dalam bentuk tugas perbantuan maupun dalam bentuk dekonsentrasi.

Program yang dilaksanakan pada periode tahun 2024 - 2026 yang bersumber dari dana APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – Dana Reboisasi (DBH SDA-DR) dan Dana *Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund* (FCPF-CF) adalah meliputi program sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Hutan
- b. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistennya
- c. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
- d. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
- e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Permendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

Tabel II-2. Tujuan, sasaran, indikator sasaran, target tahunan dan Program / kegiatan serta penyajian IKU.

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Mewujudkan Diversifikasi Ekonomi Sub Sektor KEhutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%) Sub Sektor Kehutan	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutan	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutan	Triliun Rupiah	4,162	4,895	4,922
Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutan dan Penggunaan Lahan	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutan dan Penggunaan Lahan dari <i>Business As Usual (BAU)</i>	Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutan	Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutan dari <i>Business As Usual (BAU)</i>	Juta ton CO ₂ e	1,59	1,67	1,74
Mewujudkan Birokrasi pemerintahan yang Akuntabel dan memiliki Pelayanan Publik Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah	Peningkatan Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	85	85,5	86
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Nilai)		Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	BB (76)	BB (78)	A (80,01)

Tabel II-3. Program/Kegiatan untuk mencapai tujuan/sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mewujudkan Diversifikasi Ekonomi Sub Sektor Kehutanan	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan	Triliun Rupiah	Program Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	1. Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan 2. Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan 3. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH 4. Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan 5. Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan
2	Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan	Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan	Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dari Business As Usual (BAU)	Juta ton CO2e		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan
	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Akuntabel dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas	Peningkatan Urusan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat PD	Indeks		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	1. Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi 2. Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi 4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung 5. Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi
			2. Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	Penilaian APIP		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	1. Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) 2. Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara 3. Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan 4. Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan 2. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan 3. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan 4. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan 5. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan 6. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan 7. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan 8. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan 9. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
						Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya
						Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	1. Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 2. Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 3. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
						Perbenihan Tanaman Hutan	1. Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar 2. Sertifikasi Sumber Benih 3. Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem nya	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	1. Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi 2. Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi 3. Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi
						Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention on International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES
						Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	1. Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah 2. Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah 3. Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi 4. Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
					Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan 2. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan 3. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial
					Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS 2. Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS 3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS 4. Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3. Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5. Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 3. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 4. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 5. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 6. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 4. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 5. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 6. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 9. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pengadaan Mebel 3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3. Pemeliharaan Mebel 4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							7. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 8. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran atau parameter yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan penetapan indikator kinerja utama adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
3. Membantu dalam menyamakan arah kerja antara organisasi agar selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil berkontribusi terhadap pencapaian hasil yang optimal.

Tabel II-4. Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alasan	Penjelasan (Formulasi Penghitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan	Realisasi Produksi hasil hutan Tanaman, Hutan Alam dan Non Kehutanan berpengaruh besar terhadap Penerimaan PNBP sektor kehutanan	Jumlah Produksi Hasil Hutan kayu dikali dengan harga kayu berlaku	BAPENDA Provinsi Kalimantan Timur	Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur (Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Kawasan)

2.	Menurunya Emisi Gas Rumha Kaca Sektor Kehutanan	Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dari <i>Business as Usual (BAU)</i>	Deforestasi dan degradasi hutan merupakan penyumbang utama Emisi GRK, hutan mempunyai fungsi sebagai penyerap karbon alami.	LUC = <i>Land Use Change/Perubahan Tutupan Hutan dan Lahan Baseline</i> = Tahun referensi, mengikuti tahun referensi 2 nd FRL Indonesia, taitu dari Tahun 2006-2020	Bidang Perencanaan Hutan; Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya; Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan; dan Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaa n Masyarakat Hutan	Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur
----	---	--	---	--	---	---

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Diharapkan melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerimaan amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Adapun perjanjian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Sasaran Srategis)

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Kehutanan	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Kehutanan	Triliun Rupiah	4,862
2.	Menurunya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan	Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dari <i>Business as Usual (BaU)</i>	Juta Ton CO ₂ e	1,59

Tabel II-6. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Program)

Program	Indikator	Target Kinerja	Satuan	Alokasi Anggaran
Pengelolaan Hutan	Produksi Hasil Hutan Kayu	4.450.000	M3/Tahun	49.592.983.139
	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	850	Ton	
	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,47	%	
	Persentase luas kerusakan kawasan hutan	1,00	%	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Luas Kawasan Hutan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	610.540,98	Hektar	3.653.679.411
Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat	20.000	Ha	45.007.380.884
	Jumlah Kelompok usaha masyarakat yang ditetapkan kapasitasnya	20	Kelompok	
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas Das dan Sub Das yang dikelola	10.104	Hektar	3.904.670.420
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81	Indeks	155.292.151.315
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100	%	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun sebelumnya pada sub bab ini disajikan

Tabel III-1. Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No	Komponan Yang Nilai	Bobot	Nilai 2023
1	Perencanaan Kinerja	30 %	21,60
2	Pengukuran Kinerja	20 %	14,80
3	Pelaporan Kinerja	10 %	5,90
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20 %	13,40
5	Capaian Akuntabilitas Kinerja	20 %	18,80
	Nilai Hasil Evaluasi		74,50
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Tabel III-2. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas implemtasi Sistem AKIP.

No	REKOMENDASI/URAIAN RINGKAS	TINDAK LANJUT/TANGGAPAN
1.	Perencanaan Kinerja	
	a) Pengumpulan data kinerja menggunakan data yang relavan dan mendukung untuk mengukur capaian kinerja yg diharapkan	periode renstra baru sehingga dapat mengantisipasi terjadinya perubahan indikator terhadap IKU Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim
2.	Pengukuran Kinerja	
	a) Pengumpulan data kinerja menggunakan data yang relavan dan mendukung untuk mengukur capaian kinerja yg diharapkan	menyampaikan kepada seluruh Pegawai Dinas Kehutanan dan UPTD Lingkup Dinas Kehutanan agar lebih berpartisipasi dalam mencapai kinerja

No	REKOMENDASI/URAIAN RINGKAS	TINDAK LANJUT/TANGGAPAN
		dan memahami setiap informasi yang diberikan Dinas Kehutanan atas hasil Pengukuran Kinerja dan melakukan evaluasi baik pelaporan, kinerja ataupun kegiatan secara berkala lalu memonitoring terhadap capaian kinerja masing-masing pegawai secara berkala sebagai dasar pemberian reward and punishment
	b) menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja	memonitoring terhadap capaian kinerja masing-masing pegawai secara berkala
	c) memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada seluruh level pegawai agar lebih memahami serta peduli atas hasil pengukuran kinerja secara berjenjang	Pemberian reward dan punishment kepada pegawai yang didasari oleh hasil pengukuran kinerja
3.	Pelaporan Kinerja	
	a) menyusun laporan kinerja secara berkala dalam periode yang lebih singkat	mulai menyusun dokumen laporan kinerja secara berkala pertriwulan tahun berjalan dan dituangkan dalam dokumen LKJIP, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, menambahkan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya
	b) menginformasikan perbandingan realisasi kinerja tahunan dengan realisasi kinerja level provinsi dalam dokumen laporan kinerja (LKJIP)	
	c) melakukan rapat terkait penyajian informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja (LKJIP) agar dapat menjadi perhatian utama pimpinan dan kepedulian seluruh level pegawai	
	d) memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja dalam :	

No	REKOMENDASI/URAIAN RINGKAS	TINDAK LANJUT/TANGGAPAN
	- penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja - penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja - evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja - penyesuaian perencanaan kinerja berikutnya - perbaikan budaya kinerja organisasi	
4.	Evaluasi Internal	
	a) menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai peningkatan nilai Implementasi SAKIP	Menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja organisasi
	b) memanfaatkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebagai : - perbaikan & peningkatan akuntabilitas kinerja - pendukung efektifitas dan efisiensi kinerja - dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja	Melakukan rapat evaluasi akuntabilitas kinerja
5.	Akuntabilitas Kinerja	
	a) pada komponen capaian akuntabilitas kinerja untuk lebih memperhatikan kriteria sebagaimana yang ditetapkan pada informasi capaian outcome	dalam pencapaian kinerja akan terus dilakukan perbaikan kinerja sehingga capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya dengan memberikan pengarahan kepada seluruh pejabat eselon III dan IV agar terus meningkatkan capaian kinerja

B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Tabel III-3. Pengukuran Capaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%
2	3	4	5	6	7	8	$9=8/7*100$
Meningkatnya PNPB Sub Sektor Kehutanan	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan	Triliun Rp	4,86	I	0,17	0,17	100,00%
				II	0,35	0,35	100,00%
				III	0,59	0,59	100,00%
				IV	4,86	6,92	142,39%
Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan	Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dari <i>Business as Usual (BaU)</i>	Juta ton CO ₂ e	1,59	I	0	0	0,00%
				II	0	0	0,00%
				III	0	0	0,00%
				IV	1,59	3,42	215,09%

C. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran : 1. Meningkatkan PDRB Sub Sektor Kehutanan

2. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Tabel III-4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%
1		2	3	4	$5=4/3*100$
1.	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan	Triliun Rupiah	4,862	8.528,41	175,41%
2.	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan	Juta ton CO ₂ e	1,59	3,42	215,09%

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

Tabel III-5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan / Penurunan
		Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	$5=4/3*100$
Meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan	Triliun	8.094.580.000	8.528.410.000	%
Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan	Juta ton CO ₂ e	Tidak ada	3,42	%

Keterangan : Untuk realisasi menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan Tahun 2023 belum ada karena Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur baru mengampu kinerja tersebut di Tahun 2024 sesuai dengan RENSTRA Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026

- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :

Tabel III-6. Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2024 dengan target RENSTRA Dinas Kehutanan Prov. Kaltim Tahun **2024-2026**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target RENSTRA (Tahun 2024)	% Tingkat Pencapaian
1	2	3	4	$5=3/4*100$
Meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan	Triliun Rupiah	8.528.410.000	4.862.000.000	175,41%
Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan	Juta ton CO ₂ e	3,42	1,67	215,09%

- Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari hasil Data Capaian Kinerja Sasaran **Meningkatkan PDRB Sub Sektor Kehutanan** dengan indikator Meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan (Triliun Rupiah) dapat diketahui Faktor-faktor yang mempengaruhi Peningkatan PDRB Sub Sektor Kehutanan, diantaranya adalah:

- a. Faktor realisasi produksi hasil hutan kayu, sebagaimana berikut:
 - Realisasi produksi hasil hutan kayu dari Hutan Alam (realisasi Tahun 2023 sebesar 743.025,73 m3 dan realisasi Tahun 2024 sebesar 887.293,41 m3), produksi ini mengalami peningkatan.
 - Realisasi Produksi Hasil Hutan Kayu dan Hutan Tanaman / Kemasyarakatan (realisasi Tahun 2023 sebesar 4.611.834,48 m3 dan realisasi Tahun 2024 sebesar 5.146.333,56 m3). Produksi ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan.
 - Realisasi Produksi Hasil hutan Kayu dari ijin sah lainnya (realisasi Tahun 2023 sebesar 194.343,00 m3 dan realisasi tahun 2024 sebesar 259.805,98 m3). Produksi ini mengalami peningkatan. Secara keseluruhan bahwa produksi kayu mengalami kenaikan terutama pada produksi hasil hutan kayu Hutan Tanaman.
- b. Faktor realisasi Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu mengalami peningkatan realisasi produksi sebesar 1.078 Ton pada tahun 2023 dan 1.632,96 Ton pada tahun 2024, hal ini disebabkan adanya penetapan regulasi Sistem Informasi PUHHBK (Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu) pada unit manajemen.

Dari data capaian kinerja sasaran **Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan** dengan indikator penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dari *Business As Usual (BAU)* (juta ton CO₂e) dapat diketahui Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan emisi GRK, diantaranya adalah:

- a. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai target capaian kinerja persentase penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

sektor kehutanan dan penggunaan lahan dari *Business As Usual (BAU)* (%) sebesar 23,32 %, dan telah terealisasi sebesar 50,15 %;

- b. Dinas Kehutanan memiliki 20 UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang berada di tingkat tapak sehingga memudahkan setiap kegiatan sampai pada sasaran masyarakat di dalam dan sekitar hutan;
- c. Anggaran yang memadai sehingga semua sub kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target baik dari sisi waktu dan capaian kinerja;
- d. Tersedianya sarana dan prasarana pada Dinas Kehutanan dan UPTD lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur untuk mendukung tercapainya target kegiatan;
- e. Keterlibatan Masyarakat di tingkat tapak untuk mendukung kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan seperti pembentukan Masyarakat Mitra Polhut dan Masyarakat Peduli Api;
- f. Untuk mendukung kegiatan Usaha Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan dan UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melibatkan Masyarakat di sekitar Kawasan hutan dengan membentuk Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial. Dalam mendukung pengelolaan pengembangan perhutanan sosial, maka diterbitkan Surat Keputusan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS).

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel III-7. Efisiensi penggunaan sumber daya

No.	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=3-4
1	Meningkatkan Penerimaan PNPB Sektor Kehutanan	142,37%	25,86%	116,51

No.	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Effisiensi
1	2	3	4	5=3-4
2	Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan	215,09	68,61	146,48

6. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

Berdasarkan hasil analisis program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam pencapaian kinerja terhadap sasaran strategis pada RPJMD adalah dengan Mewujudkan Difersifikasi Ekonomi Sub Sektor Kehutanan dengan indikator laju pertumbuhan ekonomi Sub Sektor Kehutanan yaitu meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan; dan menurunkan emisi gas rumah kaca sektor Kehutanan dengan indikator Persentase penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sektor Kehutanan dan Penggunaan lahan dari *Business As Usual (BAU)* yaitu menurunkan emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan. Untuk meningkatkan PDRB dan menurunkan emisi gas rumah kaca, tidak lepas dari dukungan oleh beberapa program kegiatan dan sub kegiatan baik yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Timur maupun dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi (DBH SDA DR) dan Dana FCPF-CF antara Lain di antaranya sebagaimana tertera dalam penjelasan dibawah ini:

Penyebab Keberhasilan/Kegagalan:

a. Dua Program yang mencapai capaian kinerja 100% yaitu program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS); Program Pengelolaan Hutan mencapai 141% pada Indikator Produksi Hasil Hutan Kayu dan 192% pada indikator Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu; Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan sebesar 143%, pada indikator luas kawasan hutan yang dikelola msayarakat

dan 105% pada jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya; dan Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar 105% pada indikator kuantitas layanan kesekretariatan dan 94% pada indikator persentase keluhan pengguna layanan yang di tindak lanjuti.

b. Pada Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan indikator Persentasi Kerusakan Hutan diDalam Kawasan Hutan mengalami perbaikan, rasio pencapaian realisasi sebesar 0,17% dari 1% target yang ingin dicapai, artinya dalam hal ini gangguan kerusakan hutan mengalami penurunan. Penyebab keberhasilan didukung oleh beberapa faktor diantaranya adalah:

- Faktor Alam (Cuaca) ditahun 2024, curah hujan tinggi, sehingga meningkatkan kelembapan dan mempengaruhi mengurangi tingkat kekeringan yang bisa menimbulkan kebakaran hutan dan lahan.
- Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur secara intensif melakukan kegiatan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
- Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat disekitar kawasan hutan serta melibatkan masyarakat melalui Masyarakat Peduli Api (MPA) maupun Masyarakat Mitra Polhut (MMP).

c. Pada Program Pengelolaan Hutan dengan Indikator Produksi Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), meliputi 8 (Delapan) kegiatan dengan pencapaian kinerja bervariasi.

d. Keberhasilan pada program-program yang bersumber dari APBD Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim serta DBH SDA DR Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mencapai target pada tahun 2024 disebabkan karena adanya peran aktif Dinas dan UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Prov. Kaltim

Dinas dengan Mitra Dinas Kehutanan BPHP Wil XI, BPKH Wil IV, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pemegang PBPH dan Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan Penggunaan kawasan hutan.

Solusi alternatif Penyelesaian Masalah:

- a. Penyusunan Rancangan Teknis pada kegiatan rehabilitasi diluar kawasan hutan pada kegiatan penanaman sebaiknya dilakukan lebih awal.
- b. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penatausahaan hasil hutan kepada unit manajemen untuk peningkatan realisasi produksi hasil hutan kayu maupun bukan kayu.
- c. Mengkomunikasikan dengan kementerian berkenaan dengan pengembangan hasil hutan kayu maupun bukan kayu dari UPTD Lingkup Dinas Kehutanan.
- d. Peningkatan Peran aktif Dinas dan UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Prov. Kaltim Dinas dengan Mitra Dinas Kehutanan BPHP Wil Xi, BPKH Wil IV, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pemegang IUIPHH-HA/HTI dan Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan Penggunaan kawasan hutan.

Tabel III-8. Capaian Progam dan Kegiatan Tahun 2024

Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	%
1	2	3	4	5	6=5/4*100
DINAS KEHUTANAN					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81,00	85,00	104,94
	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	94,00	94,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan	%	100,00	100,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100,00	100,00	100,00

Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	%
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100,00	100,00	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100,00	100,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100,00	96,00	96,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100,00	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	86,00	86,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100,00	97,00	97,00
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	M3/tahun	4.450.000,00	6.293.432,95	141,43
	2). Produksi hasil hutan bukan kayu	ton	850,00	1.632,96	192,11
	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,47	0,74	157,45
	4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	%	1,00	0,16	16,00
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	20,00	-	-
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	5.153.407,17	5.189.869,46	100,71
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	250,00	250,00	100,00
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	25.000,00	12.766,00	51,06
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	M3	16.499,00	-	-
Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah SK Pengada dan Pongedar Benih/Bibit terdaftar; Sertifikat Sumber Benih dan Laporan	JumlahSK	101,00	101,00	100,00
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	Hektar	610.540,98	610.540,98	100,00
Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Luas Kawasan Tahura Provinsi yang dikelola	Ha	545.675,00	545.675,00	100,00
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	20.000,00	28.561,00	142,81
	2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20,00	21,00	105,00
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	kelompok	17,00	17,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	Hektar	10.104,00	10.104,00	100,00
Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	DAS	1,00	1,00	100,00
UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81,00	81,00	100,00

Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	%
1	2	3	4	5	6=5/4*100
	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	%	100,00	100,00	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100,00	100,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100,00	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	100,00	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	M3/tahun	4.420.000,00	5.200.447,94	117,66
	2). Produksi hasil hutan bukan kayu	ton	850,00	1.632,96	192,11
	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,47	0,74	157,45
	4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	%	1,00	0,16	16,00
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	1,00	100,00
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	Hektar	610.540,98	610.540,98	100,00
Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Luas Kawasan Tahura Provinsi yang dikelola	Ha	64.815,00	64.815,00	100,00
Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	Hektar	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	20.000,00	28.561,00	142,81
	2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20,00	21,00	105,00
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	kelompok	4,00	4,00	100,00
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81,00	81,00	100,00
	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	%	100,00	100,00	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100,00	73,00	73,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100,00	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	100,00	100,00

Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	%
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	M3/tahun	4.420.000,00	5.200.447,94	117,66
	2). Produksi hasil hutan bukan kayu	ton	850,00	1.632,96	192,11
	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,47	0,74	157,45
	4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	%	1,00	0,16	16,00
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1,00	1,00	100,00
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	5.153.407,00	450.472,00	8,74
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	50,00	67,00	134,00
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	7.929.179,00	30,30	0,00
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	20.000,00	28.561,00	142,81
	2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20,00	21,00	105,00
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	kelompok	3,00	5,00	166,67
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81,00	81,00	100,00
	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100,00	100,00	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100,00	100,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	100,00	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	M3/tahun	4.420.000,00	5.200.447,94	117,66
	2). Produksi hasil hutan bukan kayu	ton	850,00	1.632,96	192,11
	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,47	0,74	157,45
	4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	%	1,00	0,16	16,00
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1,00	1,00	100,00
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	1,00	100,00
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	5,15	5,15	100,00

Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	%
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	1.200,00	1.200,00	100,00
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	7.497,00	250,10	3,34
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Luas PBPHH Bukan Kayu yang dikelola	hektar	51.534.073,00	51.534.073,00	100,00
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	20.000,00	28.561,00	142,81
	2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20,00	21,00	105,00
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	kelompok	4,00	4,00	100,00
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81,00	81,00	100,00
	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100,00	80,00	80,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100,00	80,00	80,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100,00	100,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100,00	75,00	75,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100,00	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	80,00	80,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100,00	75,00	75,00
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	M3/tahun	4.420.000,00	5.200.447,94	117,66
	2). Produksi hasil hutan bukan kayu	ton	850,00	1.632,96	192,11
	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,47	0,16	34,04
	4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	%	1,00	0,74	74,00
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1,00	1,00	100,00
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	1,00	100,00
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	5.153.407,00	3.153.000,00	61,18
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	50,00	50,00	100,00
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	7.929.179,00	4.929.000,00	62,16
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	20.000,00	28,56	0,14
	2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20,00	21,00	105,00

Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	%
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	kelompok	7,00	7,00	100,00
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81,00	86,87	107,25
	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100,00	100,00	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100,00	100,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100,00	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	100,00	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	M3/tahun	4.420.000,00	5.200.447,94	117,66
	2). Produksi hasil hutan bukan kayu	ton	850,00	1.632,96	192,11
	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,47	0,74	157,45
	4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	%	1,00	0,16	16,00
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1,00	1,00	100,00
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	1,00	100,00
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	5.153.407,17	5.153.407,17	100,00
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	50,00	50,00	100,00
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	7.929.179,13	297,50	0,00
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	20.000,00	28.561,00	142,81
	2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20,00	21,00	105,00
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	kelompok	6,00	6,00	100,00
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81,00	81,00	100,00
	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100,00	100,00	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100,00	100,00	100,00

Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	%
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100,00	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	100,00	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	M3/tahun	4.420.000,00	5.200.447,94	117,66
	2). Produksi hasil hutan bukan kayu	ton	850,00	1.632,96	192,11
	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,47	0,74	157,45
	4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	%	1,00	0,16	16,00
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1,00	1,00	100,00
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	1,00	100,00
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	5.153.407,17	5.153.407,17	100,00
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	50,00	50,00	100,00
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	7.929.179,00	7.929.179,00	100,00
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Luas PBPHH Bukan Kayu yang dikelola	hektar	550,00	483,00	87,82
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	20.000,00	28.516,00	142,58
	2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20,00	21,00	105,00
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	kelompok	1,00	1,00	100,00
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub DAS Belayan					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81,00	81,00	100,00
	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100,00	100,00	100,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100,00	100,00	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100,00	100,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	100,00	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	M3/tahun	4.420.000,00	5.200.447,94	117,66

Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	%
1	2	3	4	5	6=5/4*100
	2). Produksi hasil hutan bukan kayu	ton	850,00	1.632,96	192,11
	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,47	0,74	157,45
	4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	%	1,00	0,16	16,00
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1,00	1,00	100,00
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	1,00	100,00
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	5.153.407,00	5.153.407,00	100,00
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	50,00	50,00	100,00
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	7.929.179,00	299,33	0,00
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Luas BPBH Bukan Kayu yang dikelola	hektar	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	20.000,00	28.561,00	142,81
	2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20,00	21,00	105,00
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	kelompok	3,00	3,00	100,00
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81,00	81,00	100,00
	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100,00	100,00	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100,00	100,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100,00	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	100,00	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	M3/tahun	4.420.000,00	5.200.447,94	117,66
	2). Produksi hasil hutan bukan kayu	ton	850,00	1.632,96	192,11
	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,47	0,74	157,45
	4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	%	1,00	0,16	16,00
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1,00	1,00	100,00
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	1,00	100,00

Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	%
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)					
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	5.153.407,00	5.153.407,00	100,00
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	1,20	1,20	100,00
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	7.497.170,18	7.497.170,18	100,00
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	20.000,00	28.561,00	142,81
	2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20,00	21,00	105,00
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	kelompok	4,00	4,00	100,00
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81,00	81,00	100,00
	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100,00	100,00	100,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100,00	100,00	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100,00	100,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100,00	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	100,00	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	M3/tahun	4.420.000,00	5.200.447,94	117,66
	2). Produksi hasil hutan bukan kayu	ton	850,00	1.632,96	192,11
	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,47	0,74	157,45
	4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	%	1,00	0,16	16,00
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1,00	1,00	100,00
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	1,00	100,00
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	5.153.407,00	5.153.407,00	100,00
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	50,00	50,00	100,00
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	7.929.179,00	7.929.179,00	100,00
	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	20.000,00	28.561,00	142,81

Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	%
1	2	3	4	5	6=5/4*100
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20,00	21,00	105,00
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	kelompok	4,00	4,00	100,00
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81,00	65,00	80,25
	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	80,00	80,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	%	100,00	93,00	93,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100,00	91,00	91,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100,00	95,00	95,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%			#DIV/0!
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100,00	96,00	96,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100,00	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	100,00	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100,00	94,00	94,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%			#DIV/0!
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	M3/tahun	4.420.000,00	5.200.447,94	117,66
	2). Produksi hasil hutan bukan kayu	ton	850,00	1.632,96	192,11
	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,47	0,47	100,00
	4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	%	1,00	1,84	184,00
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1,00	1,00	100,00
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	1,00	100,00
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	5.153.407,00	4.793.000,00	93,01
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	50,00	50,00	100,00
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	7.929.179,00	7.832.000,00	98,77
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	M3	13,00	13,00	100,00
	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	20.000,00	28.561,00	142,81

Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	%
1	2	3	4	5	6=5/4*100
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20,00	21,00	105,00
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	kelompok	3,00	3,00	100,00
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81,00	81,00	100,00
	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	%	100,00	100,00	100,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100,00	100,00	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100,00	100,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100,00	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	100,00	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	M3/tahun	4.420.000,00	5.200.447,94	117,66
	2). Produksi hasil hutan bukan kayu	ton	850,00	1.632,96	192,11
	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,47	0,74	157,45
	4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	%	1,00	0,16	16,00
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1,00	1,00	100,00
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	1,00	100,00
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	5.153.407,00	-	-
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	120,00	-	-
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	7.929.179,00	-	-
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	20.000,00	28.561,00	142,81
	2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20,00	21,00	105,00
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	kelompok	4,00	-	-
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81,00	81,00	100,00
	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00

Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	%
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100,00	100,00	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100,00	100,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100,00	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	100,00	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	M3/tahun	4.420.000,00	5.200.447,94	117,66
	2). Produksi hasil hutan bukan kayu	ton	850,00	1.632,96	192,11
	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,47	0,74	157,45
	4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	%	1,00	0,16	16,00
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1,00	1,00	100,00
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	1,00	100,00
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	5,15	5.153.407,00	100.007.898,31
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	50,00	50,00	100,00
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	7,93	7.929.179,00	100.002.257,54
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	20,00	28.561,00	142.805,00
	2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20,00	21,00	105,00
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	kelompok	6,00	6,00	100,00
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81,00	81,00	100,00
	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100,00	100,00	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100,00	100,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100,00	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	100,00	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100,00	100,00	100,00

Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	%
1	2	3	4	5	6=5/4*100
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	M3/tahun	4.420.000,00	5.200.447,94	117,66
	2). Produksi hasil hutan bukan kayu	ton	850,00	1.632,96	192,11
	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,47	0,74	157,45
	4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	%	1,00	0,16	16,00
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1,00	1,00	100,00
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	1,00	100,00
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	50,00	121,00	242,00
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	7.929.179,13	5.115,00	0,06
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	20.000,00	28.561,00	142,81
	2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20,00	21,00	105,00
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	kelompok	4,00	4,00	100,00
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81,00	83,00	102,47
	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	%	100,00	100,00	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100,00	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	100,00	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	M3/tahun	4.420.000,00	5.200.447,94	117,66
	2). Produksi hasil hutan bukan kayu	ton	850,00	1.632,96	192,11
	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,47	0,74	157,45
	4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	%	1,00	0,16	16,00
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1,00	1,00	100,00
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	1,00	100,00
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	5.153.407,17	5.153.407,17	100,00

Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	%
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	100,00	100,00	100,00
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	7.497.170,18	1.136,30	0,02
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	M3	4.500,00	4.500,00	100,00
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	20.000,00	28.561,00	142,81
	2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20,00	21,00	105,00
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	kelompok	4,00	4,00	100,00
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81,00	81,00	100,00
	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	%	100,00	100,00	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100,00	100,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100,00	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	100,00	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	M3/tahun	4.420.000,00	4.420.000,00	100,00
	2). Produksi hasil hutan bukan kayu	ton	850,00	850,00	100,00
	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,47	-	-
	4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	%	1,00	0,16	16,00
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1,00	1,00	100,00
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	1,00	100,00
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	5.153.407,00	5.153.407,00	100,00
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	50,00	35,00	70,00
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	7.929.179,00	7.000.000,00	88,28
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Luas PBPHH Bukan Kayu yang dikelola	hektar	5.153.407,00	4.050.000,00	78,59
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	Hektar	610.540,98	610.540,98	100,00
Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Luas Kawasan Tahura Provinsi yang dikelola	Ha	50,00	50,00	100,00

Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	%
1	2	3	4	5	6=5/4*100
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	20.000,00	20.000,00	100,00
	2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20,00	20,00	100,00
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	kelompok	1,00	1,00	100,00
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81,00	81,00	100,00
	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	%	100,00	100,00	100,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100,00	100,00	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100,00	100,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100,00	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	100,00	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	M3/tahun	4.420.000,00	5.200.447,94	117,66
	2). Produksi hasil hutan bukan kayu	ton	850,00	1.632,96	192,11
	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,47	0,74	157,45
	4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	%	1,00	0,16	16,00
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1,00	1,00	100,00
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	1,00	100,00
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	5,15	5,15	100,00
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	50,00	50,00	100,00
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	7.929.179,00	207,30	0,00
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	M3	1,00	1,00	100,00
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	20.000,00	28.561,00	142,81
	2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20,00	21,00	105,00
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	kelompok	4,00	4,00	100,00

Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	%
1	2	3	4	5	6=5/4*100
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manoor Bulatn					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81,00	-	-
	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100,00	100,00	100,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100,00	100,00	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100,00	100,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100,00	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	100,00	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	M3/tahun	4.420.000,00	5.200.447,94	117,66
	2). Produksi hasil hutan bukan kayu	ton	850,00	1.632,96	192,11
	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,47	0,74	157,45
	4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	%	1,00	0,16	16,00
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1,00	1,00	100,00
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	1,00	100,00
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	5.153.407,00	5.153.407,00	100,00
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	50,00	50,00	100,00
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	7.929.179,00	7.929.179,00	100,00
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	20.000,00	28,56	0,14
	2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20,00	21,00	105,00
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	kelompok	5,00	5,00	100,00
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81,00	85,00	104,94
	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	94,00	94,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100,00	99,68	99,68
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100,00	99,60	99,60

Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	%
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100,00	89,12	89,12
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100,00	98,16	98,16
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100,00	89,29	89,29
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	83,73	83,73
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100,00	91,62	91,62
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	M3/tahun	4.420.000,00	5.200.447,94	117,66
	2). Produksi hasil hutan bukan kayu	ton	850,00	1.632,96	192,11
	4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	%	1,00	0,16	16,00
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1,00	1,00	100,00
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	1,00	100,00
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	5.153.407,00	5.153.407,00	100,00
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	50,00	50,00	100,00
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	7.929.179,00	7.929.179,00	100,00
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Luas PBPHH Bukan Kayu yang dikelola	hektar	18,00	18,00	100,00
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	20.000,00	28.561,00	142,81
	2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20,00	21,00	105,00
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	kelompok	3,00	3,00	100,00
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81,00	81,00	100,00
	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100,00	100,00	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100,00	100,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100,00	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	100,00	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	M3/tahun	4.420.000,00	5.200.447,94	117,66
	2). Produksi hasil hutan bukan kayu	ton	850,00	1.632,96	192,11

Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	%
1	2	3	4	5	6=5/4*100
	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,47	0,74	157,45
	4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	%	1,00	0,16	16,00
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1,00	1,00	100,00
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	2,00	2,00	100,00
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	5.153.407,00	1.500,00	0,03
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	50,00	50,00	100,00
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	7.497.170,18	22,03	0,00
Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah SK Pengada dan Pengedar Benih/Bibit terdaftar; Sertifikat Sumber Benih dan Laporan	JumlahSK	1,00	1,00	100,00
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	Hektar	610.541,00	610.541,98	100,00
Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang dilindungi	spesies	1,00	1,00	100,00
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	20.000,00	28.561,00	142,81
	2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20,00	21,00	105,00
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	kelompok	2,00	2,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	Hektar	10,10	10,10	100,00
Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	DAS	1,00	1,00	100,00
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81,00	81,00	100,00
	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100,00	100,00	100,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100,00	100,00	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100,00	100,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100,00	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	100,00	100,00

Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	%
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	M3/tahun	4.420.000,00	5.200.447,94	117,66
	2). Produksi hasil hutan bukan kayu	ton	850,00	1.632,96	192,11
	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,47	0,74	157,45
	4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	%	1,00	0,16	16,00
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1,00	1,00	100,00
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	1,00	100,00
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	5,15	5,15	100,00
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	50,00	50,00	100,00
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	7,93	7,93	100,00
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	20.000,00	28.561,00	142,81
	2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20,00	21,00	105,00
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	kelompok	3,00	3,00	100,00

D. Realisasi Anggaran

Tabel III-9. Realisasi Anggaran sesuai dengan perjanjian Kinerja

Sasaran Strategis	Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	% capaian
1). Meningkatkan PDRB Sub Sektor Kehutanan 2). Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dari <i>Bussines as Usual</i> (Bau)	Pengelolaan Hutan	1). Produksi hasil hutan kayu	4.450.000,00	6.293.432,95	141%	273.400.765.737,00	256.065.007.307,99	94%
		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	850,00	1.632,96	192%			
		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,47	0,74	157%			
		4). Persentase luas	1,00	0,16	16%			

Sasaran Strategis	Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	% capaian
		kerusakan kawasan hutan						
	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	610.540,98	610.540,98	100%	15.237.704.611,00	14.632.667.676,00	96%
	Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20.000,00	28.561,00	143%	93.646.218.074,00	90.515.157.849,00	97%
		2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20,00	21,00	105%			
	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	10.104,00	10.104,00	100%	4.465.670.420,00	4.168.977.054,00	93%
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariat an	81,00	85,14	105%	244.102.277.245,00	231.510.791.558,42	95%
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100,00	94,00	94%			

Tabel III-10. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	%
1	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	273.399.865.737	256.065.007.308	93,66%
		2). Produksi hasil hutan bukan kayu			
		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi			
		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan			
	Kegiatan:				
	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	79.438.076.213	72.409.435.310	91,15%
	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	8.667.665.071	8.157.630.091	94,12%

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	%
	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	15.630.820.246	14.842.344.765	94,96%
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	98.910.094.352	93.784.978.286	94,82%
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	55.193.033.705	51.572.177.534	93,44%
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Luas PBPHH Bukan Kayu yang dikelola	10.959.121.800	10.817.861.925	98,71%
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	2.055.735.100	1.957.153.277	95,20%
	Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah SK Pengada dan Pengedar Benih/Bibit terdaftar; Sertifikat Sumber Benih dan Laporan	2.545.319.250	2.523.426.120	99,14%
2	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	15.237.704.611	14.632.667.676	96,03%
	Kegiatan				
	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Luas Kawasan Tahura Provinsi yang dikelola	14.532.199.611	13.936.788.301	95,90%
	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang dilindungi	100.000.000	96.044.550	96,04%
	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	605.505.000	599.834.825	99,06%
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	93.629.369.262	90.515.157.849	96,67%
	Kegiatan	2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya			
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	93.629.369.262	90.515.157.849	96,67%
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	4.465.670.420	4.168.977.054	93,36%
	Kegiatan				
	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	4.465.670.420	4.168.977.054	93,36%
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	244.102.277.245	231.510.791.558	94,84%
	Kegiatan:	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti			

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan	1.859.551.000	1.792.409.673	96,39%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	132.236.427.872	127.622.099.127	96,51%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	1.042.153.000	1.011.104.086	97,02%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	5.995.571.170	5.765.341.741	96,16%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	103.920.000	99.820.000	96,05%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.075.606.603	15.467.081.817	96,21%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28.762.318.017	27.500.885.212	95,61%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	29.412.428.573	27.087.260.577	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	28.264.472.010	24.825.933.903	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	349.829.000	338.855.422	96,86%
TOTAL			630.834.887.275	596.892.601.445	94,62%

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Memperhatikan data serta pembahasan capaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2024, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Tahun 2024 menunjukkan bahwa sasaran strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur "**Berhasil**" mencapai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, dengan sasaran strategis Meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan dengan indikator Meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan tercapai 8.528,41 Triliun Rupiah dengan target 4,862 Triliun Rupiah dengan rasio capaian sebesar 175,41% dan sasaran Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dengan indikator Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dari *Business as Usual (Bau)* tercapai 3,42 Juta Ton CO₂e dengan target 1,59 Juta Ton CO₂e dengan rasio capaian sebesar 215%.
2. Adapun untuk mendukung Sasaran Strategis tersebut sehingga berhasil mencapai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan di tunjang dengan Program dan Kegiatan yang bersumber pada APBD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:
 - a. Program Pengelolaan Hutan (realisasi Kinerja produksi hasil hutan kayu 141,43%; hasil hutan bukan kayu 192,11%; Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 157,45%; dan Persentase luas kerusakan kawasan hutan 16,00%, realisasi keuangan 93,66%) dengan Kegiatan:
 - 1) Pengelolaan rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (realisasi keuangan 91,15%);

- 2) Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK) (Realisasi keuangan 94,12%);
 - 3) Pemanfaatan hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (realisasi keuangan 94,96%);
 - 4) Pelaksanaan rehabilitasi diluar kawasan hutan negara (realisasi keuangan 94,82%);
 - 5) Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (realisasi keuangan 93,44%);
 - 6) Pelaksanaan Pengolahan Hasil hutan bukan kayu (HHBK) (realisasi keuangan 98,71%)
 - 7) Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m³/Tahun (realisasi keuangan 95,20%)
 - 8) Perbenihan tanaman hutan (realisasi keuangan 99,14%)
- b. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (realisasi kinerja 100 %, realisasi keuangan 96,03 %) dengan kegiatan:
- 1) Pengelolaan taman hutan raya (TAHURA) Provinsi (realisasi keuangan 99,21%);
 - 2) Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention on International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi (realisasi keuangan 96,04%)
 - 3) Pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam (realisasi keuangan 88,08%);
- c. Program Pendidikan dan pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan masyarakat di bidang Kehutanan (realisasi kinerja 101,38% untuk indikator luas kawasan hutan yang di kelola masyarakat; dan 105%

untuk indikator Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya, realisasi keuangan 96,66%);

1) Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (realisasi keuangan 96,66%);

d. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) (realisasi fisik 100,00%, realisasi keuangan 93,36%);

1) Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) (realisasi keuangan 93,36%);

3. Berdasarkan realisasi penyerapan keuangan yang mencapai 93,66% hingga 96,66%, dalam proses pelaksanaan masih terdapat berbagai kendala dan hambatan secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan tetap berjalan optimal dan efektif, hal ini tidak lepas dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan sehingga dalam pelaksanaan kegiatan dapat lebih efektif.

B. Langkah di Masa Mendatang yang Akan Dilakukan Organisasi Untuk Meningkatkan Kinerjanya

1. Dinas Kehutanan Provinsi mempunyai 20 Unit Pelaksana Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019, maka diharapkan kepada UPTD KPH untuk lebih berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di tingkat tapak sehingga dalam pengelolaan hutan dapat dikelola secara lestari yang berlandaskan pada aspek ekologi, aspek ekonomi dan aspek sosial.
2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap mitra – mitra kerja (IUPHHK HA/HTI, IPPKH, LSM, KTH dan Masyarakat sekitar hutan) di dalam wilayah kerja UPTD KPH masing-masing.
3. Perlu dilakukan sinkronisasi dan integrasi data dari Bidang dan UPTD lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang dikelola dan didesain dengan baik sehingga menjadi pedoman dan acuan

dalam merencanakan kegiatan, mempermudah dalam pengawasan dan meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi.

4. Mendorong peningkatan kinerja ASN terutama yang berhubungan langsung dengan masyarakat di sekitar kawasan hutan, dengan melakukan sosialisasi secara berkala terhadap tujuan sasaran strategis kebijakan Kehutanan.
5. Melibatkan stakeholder terkait dalam pengembangan perhutanan sosial sehingga dapat melakukan percepatan wilayah terpadu *Integrated areal Development* (IAD) Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial.